

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, Siti. 2016. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sleman*. Tesis. Universitas Gadjah Mada
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. PT. Gelora Aksara Pratama. Yogyakarta
- Desmawanda, Gusti Satrya. 2016. *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (Studi Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada
- El Raseed, Harun dan Peter Robinson. 2005. Implementaing Accrual Regime in the Context of the Indonesian Public Sector Accounting Reform. *Simposium Riset Ekonomi II*. pp.1-20
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP No. 24 Tahun 2005*. BPFE. Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Cetakan VII*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdullah dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol.2. No.1. hal. 53-64
- Hariyanto, Agus. 2012. Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Dharma Ekonomi*. No. 36. hal 1-11.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2015)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ismiyati. 2016. *Evaluasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Lima Pemerintah Daerah)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Kasiram, Mohammad. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press
- Luder, Klaus G. 1192. A Contingency Model of Governmental Accounting Innovations in the Political-Administrative Environment. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*. Vol 7. pp. 99-127
- Mahmudi. 2003. New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *Kajian Bisnis dan Manajemen*. Vol. 6. hal. 69-76
- Mahadi, R, Noordin, R, Mail, R, & Sariman, K. 2014. Accrual Accounting in Malaysia: what we should learn from others. *Malaysian Journal of Business and Economic*. Vol.1. No. 2. hal. 63-76
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Mehr, Akbar Amini, Rezwan Hejazi and Ziyaaldin Shahim Pourmehr. 2015. Assessment the Usefulness of Accrual Accounting on Reporting Transparency and Accountability of the Ministry of Science Universities. *Singapore Journal of Business Economics and Management Studies*. Vol. 5. No.7. pp.83-88
- Nurprihatini. 2015. *Evaluasi Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada
- Purwanto, Wahyu. 2015. *Kajian Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis. Universitas Gadjah Mada
- Sari, DP & Putra, HS 2012, Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen*. Vol XI. No.2.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Edisi Keempat Buku 1)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Setyaningsih, Titik. 2013. *Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Dan Anggota DPRD Terhadap Standar Akuntansi Berbasis AkruaI*. Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta.
- Sugiyono. 2012. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung:Alfabeta
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi
- Surepno. 2015. Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol 7. No.2. hal. 119-128.
- Suroto. 2016. *Analisis Proses Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Studi Di Pemerintah Kabupaten Mempawah)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada
- Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPF: Yogyakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- _____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- _____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

_____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah

_____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan

_____. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Widyastuti, N. M. A. 2015. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam
Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Di Kabupaten
Gianyar*. Tesis. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.

Wirartha, Kadek Juli. 2016. *Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
Dalam Aplikasi Saiba (Studi Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali)*.
Tesis. Universitas Gadjah Mada

www.banyumaskab.go.id

www.purbalinggakab.go.id